

“NEW SAKPOLE” SEBUAH ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ERA PANDEMI COVID-19**Faris Budiman¹, Kismartini², A Rina Herawati³**¹Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Magister Administrasi Publik^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Magister Administrasi PublikEmail : farisbudiman.68@gmail.com**Abstract**

The problem raised in this study is how to innovate "New Sakpole" as an e-government-based public service strategy for motor vehicle tax payments in Central Java. Based on the formulation of the problem, this study aims to describe the innovation "New Sakpole" as an e-government-based public service strategy for motor vehicle tax payments by the Central Java Government. The theory used in this research is the theory of public policy and policy evaluation. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The data analysis technique used is qualitative analysis (data reduction, presentation and conclusion). The results show that "New Sakpole" is a public policy innovation for the Central Java government in terms of encouraging people to be obedient and disciplined in paying motor vehicle taxes. This policy is very effective because it can cut people's time and energy, and does not cause crowds. The "New Sakpole" public policy as one of the innovations of the Central Java government is a breakthrough that has never been carried out by other governments. This policy can be imitated by other governments in order to boost revenue from the taxation sector, particularly in the motor vehicle tax sector.

Keywords: *new sakpole, public service, motor vehicle tax, Central Java***DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2564>**1. PENDAHULUAN**

Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan fenomena kemunculan virus yang cukup ganas yang menyerang sistem pernapasan. Virus tersebut dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Belakangan virus tersebut diidentifikasi sebagai Covid-19 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2/SARS-CoV-2*). Pandemi Covid-19 yang menimpa telah menyebar ke hampir seluruh Negara dunia ini bukan kali pertama dalam sejarah. Dalam sejarahnya, dunia telah dilanda pandemi seperti Covid-19 dengan jumlah korban hingga jutaan manusia. Selain korban jiwa, pandemik apapun bentuknya berdampak pada mobilitas manusia dan kegiatan ekonomi.

Dampak yang dirasakan langsung dengan adanya Pandemi Covid-19 yaitu perdagangan,

investasi, pariwisata, sektor pajak, penerimaan pajak sektor perdagangan. Padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak dari segi investasi, investor banyak yang menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau akibat asumsi pasarnya berubah. Secara keseluruhan, pandemi covid-19 berdampak pada terjadinya perlambatan ekonomi bagi Indonesia, aktifitas ekonomi masyarakat terhenti dan masyarakat menjadi tidak memiliki penghasilan.

Kondisi ekonomi yang semakin sulit pada saat pandemi ditambah ketakutan masyarakat akan tertular Covid-19 jika berada di tempat-tempat pelayanan publik mengakibatkan tersendatnya keuangan Negara dari sektor pajak yang tidak terbayar oleh masyarakat. Akibatnya, kegiatan atau aktifitas yang dapat menyebabkan kerumunan orang sangat dihindari, seperti

ketika membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran pajak kendaraan bermotor masih mengharuskan masyarakat untuk mengantri di tempat-tempat pelayanan publik. Masyarakat enggan untuk keluar rumah dan berkerumun.

Apabila kondisi tersebut berlarut-larut, maka dapat menjadi beban keuangan Negara. Apalagi di tengah pandemi saat ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menutupi anggaran dalam penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang membutuhkan anggaran senilai Rp 695,2 T pada tahun 2020. Penolakan membayar pajak hanya akan memperlebar defisit fiskal dan semakin

menekan perekonomian nasional, disamping menimbulkan risiko besar dari sisi kesehatan masyarakat karena tidak tertanganinya pandemi Covid-19 ini dengan baik dan cepat. Sementara data menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan Negara, terutama dari sektor pajak.

Salah satu target pajak yang tidak tercapai di wilayah Jawa Tengah yaitu di sektor pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data Bapenda Provinsi Jawa Tengah, penurunan realisasi pajak hingga mencapai angka 45% dari target yang ditetapkan Pemerintah Jawa Tengah, padahal pajak menjadi penyumbang nomor satu pendapatan pemerintah Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Tahun 2020

TARGET PAJAK RANMOR 2020		REALISASI PAJAK RANMOR 2020		PERSENTASE	
R2	R4	R2	R4	R2	R4
2.141.122.797.000	3.137.306.203.000	973.904.724.100	1.567.051.299.425	45 %	50 %

Sumber: Data Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan pada tabel 1. di atas, dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan yang sangat besar antara data target pajak kendaraan bermotor dengan data realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 di wilayah Jawa Tengah. Realisasi target pajak kendaraan bermotor khusus sepeda motor hanya mencapai 45% dari target yang sudah ditetapkan. Sementara realisasi target pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan roda empat mencapai 50% dari target. Hal ini antara lain disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19.

Maka perlu adanya inovasi di bidang pelayanan publik khususnya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inovasi dianggap bisa menjawab tantangan pelayanan publik di era pandemi Covid-19 ini. Pentingnya inovasi disampaikan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa. Menurut Diah Natalisa, di masa pandemi penting untuk

berinovasi dan tentunya mengembangkan inovasi yang sudah ada melalui replikasi guna menyebarkan praktik-praktik inovatif yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik.

Inovasi kebijakan pajak sebenarnya bukan hal baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian Abdul Rahman (2018), menunjukkan bahwa salah satu inovasi yang dilakukan misalnya dengan menerapkan konsep *reward-non finansial* dan *punishment* berupa sanksi sosial. Konsep ini diwujudkan dengan memberikan ketidakmudahan (*punishment*) dan kemudahan (*reward*), bagi wajib pajak tidak patuh dan patuh, dalam mendapatkan pelayanan publik. Dalam implementasinya, dibutuhkan integrasi data antara bank, direktorat jenderal pajak, dan institusi pemerintah terkait. Oleh karenanya keteladanan, komitmen, dan keseriusan pemerintah sangatlah diperlukan.

Inovasi lain yang dilakukan misalnya ditunjukkan oleh penelitian Widi Setya Anjani

dkk (2019). Inovasi tersebut yaitu Samsat Masuk Desa (Samades). Inovasi pelayanan publik Samades ini belum merata tingkat adaptasinya di semua desa. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor yang salah satunya dalam hal sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang belum merata ke tiap lapisan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat adaptasi oleh masyarakat di kedua desa, yaitu Desa Talaga dan Desa Kasomalang terdapat perbedaan yang menjadikan inovasi pelayanan Samsat Masuk Desa di Desa Talaga bisa diadaptasi dengan baik sedangkan di Desa Kasomalang belum cukup baik.

Berdasarkan literatur tersebut, penelitian tentang inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi smartphone belum pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yaitu menyangkut strategi oleh pemerintah dengan menerapkan *reward* dan *punishment*, dan dengan menjemput bola. Sementara penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu inovasi melalui pemanfaatan teknologi android yang sekarang dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji tentang kebijakan inovasi “New Sakpole” sebagai strategi pelayanan publik untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe Penelitian menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami fenomena yang terjadi, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran strategi inovasi “New Sakpole” untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor pada situasi Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dan Kantor Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Teknik Penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan

keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Inovasi

Anderson (2006) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kemudian Nugroho (2003:51) mendefinisikan kebijakan publik yaitu jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut. Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga.

Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik, (2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, (3) fungsi pemerintah sebagai layanan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rumusan tindakan-tindakan pemerintah yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam sebuah industry, inovasi memiliki peran penting.

Sementara inovasi merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh oleh korporasi dan atau pemerintah untuk tetap *survive* dalam menghadapi perubahan eksternal dan manajemen yang berkelanjutan. Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembangnya suatu organisasi. Beberapa organisasi baik itu organisasi sektor swasta ataupun sektor publik seperti organisasi pemerintahan berupaya untuk menemukan inovasi-inovasi.

Menurut Said (2007:27), inovasi merupakan suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi. Menurut Hamel (dalam Ancok, 2012:34), inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisms yang lama dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan. Dengan demikian, inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan yang baru saja, namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya suatu perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu oraganisasi.

3.2. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Bardach (2012) membagi kriteria tersebut menjadi 4 kriteria yaitu *technical feasibility*, *Economic and financial possibility*, *Political viability*, dan *Administrative operatibility*. *Technical feasibility* berarti mengukur apakah alternatif kebijakan yang diajukan secara teknis dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan. *Economic and financial possibility* berarti berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap alternatif kebijakan. *Political viability* berarti mengukur apakah setiap alternatif kebijakan akan memberikan dampak kekuatan secara politis bagi kelompok tertentu. *Administrative operatibility* berarti mengukur kemungkinan diterapkannya alternatif kebijakan tersebut dari perspektif administratif.

3.3. Operasionalisasi Kriteria

Berdasarkan rumusan masalah maka operasionalisasi kriteria adalah sebagai berikut:

1. *Technical feasibility*
Mencapai tujuan tercapainya target pembayaran pajak kendaraan bermotor
2. *Economic and financial possibility*
Anggaran yang digunakan terjangkau
3. *Political viability*
Mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait
4. *Administrative operatibility*
Dapat dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir

3.4. Identifikasi Alternatif Rencana Kebijakan

1. Aplikasi New Sakpole

Aplikasi “New Sakpole” merupakan aplikasi informasi terkait dengan pembayaran pajak dan pengesahan STNK secara online yang berbasis android. Aplikasi “New Sakpole” merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Pajak Online. Aplikasi tersedia di Play Store di smartphone berbasis Android. Aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak dan mendapatkan pengesahan serta informasi kendaraan bermotor dengan memanfaatkan perangkat smartphone sebagai media, sehingga masyarakat tidak perlu mengantre dalam mengurus pajak. Melalui aplikasi “New Sakpole”, masyarakat bisa melakukan penturusan STNK di Jateng di mana saja. Jika sudah membuka aplikasi, pengguna bisa menekan fitur pendaftaran online. Isi data-data dan ikuti petunjuk hingga muncul kode bayar. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menambahkan pembayaran bisa dilakukan melalui e-banking, mobile banking atau melalui ATM. Struk atau bukti bayar berlaku 14 hari kerja. Jika sudah membayar, wajib pajak bisa datang ke kantor Samsat Online atau Samsat Keliling untuk menukar dengan SKPD asli dengan membawa STNK dan KTP, tidak perlu antre.

2. Reward-non finansial dan punishment

Metode yang biasa digunakan dalam proses belajar adalah pemberian

metode *rewards* (hadiah) dan *punishment* (hukuman). *Rewards* (hadiah) diberikan ketika individu menampilkan respon positif yang diinginkan, sedangkan hukuman diberikan ketika individu menampilkan respon negatif atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Metode *rewards* dan *punishment* ini juga dapat digunakan dalam perpajakan contohnya adalah di Jepang dimana pemerintahnya menawarkan kesempatan untuk berfoto bersama dengan Kaisar jika mengisi laporan pajak dengan jujur. Filipina akan memasukkan nama Anda kedalam undian jika mengikuti aturan tentang pajak pertambahan nilai, sedangkan Korea Selatan akan memberikan Anda penghargaan berupa sertifikat dan ruangan VIP di bandara bila Anda jujur dan taat dengan peraturan terkait perpajakan

Metode pemberian metode *rewards* (hadiah) dan *punishment* (hukuman) ini kemudian di kembangkan di Indonesia dengan konsep *reward-non finansial* dan *punishment* berupa sanksi sosial. Konsep

ini diwujudkan dengan memberikan ketidakmudahan (*punishment*) bagi wajib pajak yang tidak patuh dan kemudahan (*reward*), bagi wajib pajak patuh dalam mendapatkan pelayanan publik.

3. Samsat Masuk Desa (SAMADES)

Program Samsat Masuk Desa (SAMADES) ini merupakan inovasi layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara menjemput ke desa yang selama ini jauh atau tidak terjangkau dari Kantor Samsat induk dan Samsat Keliling. Untuk Samsat Masuk Desa, akan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat yakni kantor lurah, desa, camat dan balai desa pertemuan warga yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kini para wajib pajak tidak harus datang ke Kantor Samsat Induk, cukup membayar pajak di Samsat Masuk Desa (Samades) yang buka setiap hari kecuali hari libur.

Tabel 2.
Skala Penilaian

NO	ASPEK	1(SANGAT RENDAH)	5(SANGAT TINGGI)
1	<i>TECHNICAL FEASIBILITY</i>	Tidak Mendukung pencapaian tujuan	Mendukung pencapaian tujuan
2	<i>ECONOMIC AND FINANCIAL POSSIBILITY</i>	Anggaran tidak efektif dan membebani anggaran keuangan	Anggaran digunakan secara efektif dan efisien serta tidak membebani anggaran keuangan
3	<i>POLITICAL VIABILITY</i>	Tidak didukung oleh stakeholder terkait dan masyarakat	Didukung oleh stakeholder terkait
4	<i>ADMINISTRATIVE OPERABILITY</i>	Dilaksanakan secara tidak sistematis dan terorganisir dan tidak akuntabel	Dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir dan akuntabel

Tabel 3.
Penilaian Alternatif Kebijakan

ALTERNATIF	KRITERIA				TOTAL
	<i>TECHNICAL FEASIBILITY</i>	<i>ECONOMIC AND FINANCIAL POSSIBILITY</i>	<i>POLITICAL VIABILITY</i>	<i>ADMINISTRATIVE OPERABILITY</i>	
APLIKASI NEW SAKPOLE	5	3	4	5	17
REWARD-NON FINANCIAL DAN PUNISHMENT	2	5	3	2	12
SAMSAT MASUK DESA (SAMADES).	3	3	3	4	13

Tabel 4.
Penilaian Alternatif Kebijakan

ALTERNATIF KEBIJAKAN	KRITERIA			
	<i>TECHNICAL FEASIBILITY</i>	<i>ECONOMIC AND FINANCIAL POSSIBILITY</i>	<i>POLITICAL VIABILITY</i>	<i>ADMINISTRATIVE OPERABILITY</i>
APLIKASI NEW SAKPOLE	Dapat mencapai tujuan karena pembayaran pajak sangat dipermudah.	Mebutuhkan biaya untuk membangun aplikasi dan sistem	Dapat diterima oleh banyak pihak.	Sangat sistematis karena mengandalkan teknologi.
REWARD-NON FINANCIAL DAN PUNISHMENT	Kurang efektif dalam mencapai tujuan.	Tidak membutuhkan biaya	Tidak semua pihak dapat menerima	Kurang sistematis
SAMSAT MASUK DESA (SAMADES).	Dapat mencapai tujuan namun tidak maksimal karena hanya menjangkau desa-desa	Mebutuhkan biaya untuk sarana dan prasarana Samades	Hanya masyarakat desa yang menerima.	Sistematis namun tidak menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka penulis merekomendasikan alternatif kebijakan dengan Aplikasi New SAKpole. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut maka perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh tentang penggunaan aplikasi ini, sehingga tujuan dan juga manfaat dari aplikasi ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dan pada akhirnya tujuan dari alternatif kebijakan tersebut dapat tercapai. Kebijakan publik New SAKpole sebagai salah

satu kebijakan pemerintah Jawa Tengah merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah lainnya. Kebijakan tersebut dapat ditiru oleh pemerintah lainnya dalam rangka untuk mendongkrak pemasukan sektor perpajakan, khususnya sektor pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Ancok, D. (2012). Psikologi kepemimpinan dan kebijakan. Jakarta: Erlangga.
- Anderson, James. (2006). Publik Policy Making: An Introduction. Belmont: Wadsworth.
- Bardach, E, 2012, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving (4th Edition). Sage, Washington DC
- Dr. Abdul Rahman, SKM, M.Si, (2018) Kebijakan Dalam Pelayanan Publik: Meningkatkan Kepatuhan Pajak Dengan Mekanisme Reward Dan Punishment, dalam http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_692024921571.pdf
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Said, M. Mas'ud, (2006) Birokrasi di Negara Birokratus. Malang: UMM Press
- Widi Setya Anjani, Pipin Hanapiah, Rudiana, (2019), Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Kegiatan Samsat Masuk Desa, Vol..5, No.2, 2019 Doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21739>
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index>
- .